



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI CAKRAWATI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI TEKNOLOGII PANGAN
3. NHK : 1003293

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **384.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOUL GT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, SUZUKI THUNDER Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



6. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.291.320.368
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.879.320.368
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.879.320.368

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.